Pengembangan Biaya Perjalanan Dengan Metode Kontingent Valuasi Ekonomi (CMV)

Keragaman flora dan fauna dan jasa wisata alam lainnya sangat menarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung sambil melakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan sebagainya yang tidak merusak lingkungan alami. Pengukuran atau penilaian valuasi ekonomi lingkungan perlu diterapkan agar pengembangan wisata alam tidak menjadi terkuras, paling tidak diharapkan kita memiliki wawasan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung sebuah objek wisata alam dalam pengelolaan dan pengembangan wisata alam.

Buku ini menyajikan salah satu alat valuasi dalam ekonomi lingkungan yang dikenal dengan Metode Kontingent Valuasi. Metode ini dalam penerapannya merupakan pertanyaan hipotesis kepada para pengunjung tentang kesediaan mereka membayar (WTP) atas jasa sumberdaya alam yang masih utuh dan kesediaan mereka minta ganti rugi (WTA) atas sumberdaya alam yang tidak dapat lagi dinikmati (tidak utuh). Penerapan metode ini sebenarnya dapat lagi dikembangkan dengan modifikasi lain dalam penelitian terapan. Mudah-mudahan buku ini akan dapat menambah wawasan para pembaca guna melakukan penelitian lanjutan atau dapat diterapkan pada kebijakan pengembangan wisata alam yang tepat.

Dr. Muhammad Safri, SE., M.Si adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, menamatkan pendidikan pada Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, S2 pada Ilmu Perencanaan Wilayah dan Pedesaan IPB dan S3 pada Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB. Pernah mengecam berbagai pelatihan singkat seperti Pelatihan tingkat Dasar Teknik Perencanaan Pembangunan Daerah di FE Unsyiah Kuala Banda Aceh dan tingkat intermediate di Amherst, Universitas Massachusetts di Amerika Serikat. Aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta.

Pengembangan Biaya Perjalanan Dengan Metode Kontingent Valuasi Ekonomi (CMV)

MUHAMMAD SAFRI

MUHAMMAD SAFRI

Pengembangan Biaya Perjalanan

dengan

Metode Kontingent Valuasi Ekonomi (CVM)

PENGEMBANGAN BIAYA PERJALANAN DENGAN METODE KONTINGENT VALUASI EKONOMI (CVM)

MUHAMMAD SAFRI

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

**PENGEMBANGAN BIAYA PERJALANAN DENGAN METODE
KONTINGENT VALUASI EKONOMI (CVM)**

Penulis:

Muhammad Safri

ISBN : 978-623-93873-2-7

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com

Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin
penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT. atas semua limpahan rahmat dan hidayahNya, dengan telah terbitnya buku, **“Pengembangan Biaya Perjalanan Dengan Metode Kontingen Valuasi (Contingent Valuation Methode)”**. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, mudah-mudahan kehadirannya dapat memberikan sumbangan positif terhadap sisi teoritis dunia pariwisata alam, implementasi kebijakan bagi pemerintah dan para pihak lainnya maupun masyarakat umum.

Pariwisata alam memberikan dampak positif dalam menunjang upaya konservasi dan meningkatkan upaya perlindungan terhadap flora dan fauna sebagai salah satu cara mencapai paradigma baru pembangunan, seraya meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dalam pengembangan sektor pariwisata. Untuk itu buku metode kontingen valuasi ekonomi lingkungan ini sengaja ditulis, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Dalam kerangka penyempurnaan tulisan dimasa yang akan datang, sudah barang tentu semua masukan yang sifatnya membangun akan diterima dengan senang hati. Akhirnya secara khusus diucapkan penghargaan yang tinggi kepada penerbit Pena Persada yang telah bersedia melakukan kerjasama menerbitkan buku ini.

Jambi, Mei 2020

Muhammad Safri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERAN PEMERINTAHAN DALAM PENING- KATAN PARIWISATA	6
BAB III AKULTURASI BUDAYA DALAM PARIWISATA	11
BAB IV PENINGKATAN EKONOMI LINGKUNGAN & EKONOMI MASYARAKAT	13
A. Peningkatan Ekonomi Lingkungan	13
B. Peningkatan Ekonomi Masyarakat	15
BAB V CONTINGENT VALUASI EKONOMI.....	28
A. Evaluasi Ekonomi	28
B. <i>Contingent Valuation Method</i>	32
BAB VI ANALISIS NILAI EKONOMI TAMAN DHARMA WANITA KOTA PEKAN BARU (METHODE CONTINGENT VALUATION).....	34
A. Sektor Pariwisata	36
B. Pariwisata dan Rekreasi	37
C. <i>Contingent Valuation Method</i> (CVM).....	38
D. Surplus Konsumen & Nilai Ekonomi	41
BAB VII PENDEKATAN BIAYA PERJALANAN	43
BAB VIII FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERTUMBUHAN DAERAH	49
A. Laju Pembangunan Ekonomi	50
B. Faktor-Faktor Penyebab Pertumbuhan Daerah	51
C. Ekonomi Kesejahteraan	52
BAB IX PENUTUP	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

Kepariwisata Indonesia adalah pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Letak geografis Indonesia yang diapit 2 benua (Asia dan Australia) menjadi lokasi yang strategis bagi para wisatawan mancanegara untuk berlibur. Ditambah lagi rendahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tentu menambah daya tarik sektor pariwisata Indonesia. Dengan adanya potensi sektor pariwisata di Indonesia, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional baik dalam bentuk devisa asing maupun perputaran uang di dalam negeri. Pariwisata juga bermanfaat dalam meningkatkan lapangan kerja, taraf hidup, dan pendapatan masyarakat (Famytyas, 2014).

Perkembangan kegiatan ekowisata di Indonesia lebih mengarah pada kawasan yang dilindungi (kawasan hutan konservasi) karena obyek daya tarik wisata alamnya yang lebih tinggi. Salah satu lokasi tujuan kegiatan ekowisata yaitu kawasan Taman Wisata Alam (TWA). Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam (Premono B. et al, 2008). Pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu menggalakan ekonomi, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa (Joyosuharto, 1995 dalam Soebagyo, 2012).

Pariwisata merupakan sektor yang sangat kompleks karena pariwisata bersifat multidimensi, baik fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu kegiatan pariwisata sebagai kegiatan matarantai akan melibatkan berbagai sektor dan lembaga

yang terkait. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Kecenderungan perkembangan dunia pariwisata mulai meninggalkan konsep pariwisata massal dan mengarah kepada konsep pariwisata lingkungan (ecotourism), dimana keaslian potensi kekayaan alam dan peran serta masyarakat setempat dibutuhkan. Indonesia yang merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah ruah mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan terutama wisata alam. Penilaian terhadap suatu kawasan wisata memiliki peranan yang dapat menentukan pengembangan dari tempat wisata itu sendiri yang mencakup berbagai faktor yang berkaitan dengan nilai sosial dan politik. Menurut Ward et.al, 2000 (dalam Rahardjo) metode penilaian khususnya untuk mengukur nilai ekonomi wisata alam yang paling banyak dipakai adalah Travel Cost Method (TCM). Metode ini menduga nilai ekonomi kawasan wisata berdasarkan penilaian yang diberikan masing-masing individu atau masyarakat terhadap kenikmatan yang tidak ternilai (dalam rupiah) dari biaya yang dikeluarkan untuk berkunjung ke sebuah objek wisata, baik itu opportunity cost maupun biaya langsung yang dikeluarkan seperti biaya transportasi, konsumsi makanan, minuman, hotel, tiket masuk dan sebagainya.

Secara ekonomi pariwisata massal telah memberikan manfaat yang besar, akan tetapi aspek sosial dan lingkungan kurang diperhatikan. Selain itu, dampak positif dari aspek ekonomi pariwisata massal kurang dirasakan oleh masyarakat setempat. Menurut Sihite (2000), hal ini antara lain disebabkan pariwisata massal lebih banyak menggunakan fasilitas atau bahan impor sehingga dampak gandanya (*multiplier effect*) bagi masyarakat setempat sangat kecil. Penggunaan sarana pariwisata yang berasal dari modal asing (misalnya hotel), juga menyebabkan kurangnya kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam aspek sosial dan lingkungan, Soemarwoto (2001) menyatakan bahwa pariwisata massal telah menimbulkan berbagai permasalahan. Masyarakat setempat dalam pariwisata massal dapat terusir akibat konversi lahan pertanian untuk pembangunan prasarana pariwisata yang tidak terkendali. Rumah-rumah asli penduduk dan bangunan yang bernilai sejarah berkurang keasliannya karena terlalu menekankan aspek komersial. Pariwisata massal juga menyebabkan peningkatan tindak kejahatan atau munculnya perilaku yang bertentangan dengan norma adat setempat. Nilai-nilai asli kesenian maupun upacara tradisional akan berkurang keasliannya karena perubahan orientasi yang cenderung komersial.

Pariwisata merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu. Alasannya, karena aktivitas berwisata bagi seorang individu dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan kerja, relaksasi, berbelanja, bisnis, mengetahui peninggalan sejarah dan budaya suatu etnik tertentu, kesehatan dan pariwisata spiritualisme. Meningkatnya waktu luang sebagai akibat lebih singkatnya hari kerja dan didukung oleh meningkatnya penghasilan, maka aktivitas kepariwisataan akan semakin meningkat. Tempat rekreasi tidak memiliki nilai pasar yang pasti, maka penilaian tempat rekreasi dilakukan dengan pendekatan biaya perjalanan. Metode biaya perjalanan ini dilakukan dengan menggunakan informasi tentang jumlah uang yang dikeluarkan dan waktu yang digunakan untuk mencapai tempat rekreasi untuk mengestimasi besarnya nilai benefit dari upaya perubahan kualitas lingkungan dari tempat rekreasi yang dikunjungi (Yakkin, 1997 dalam Igunawati, 2010).

Pembangunan, termasuk pembangunan pariwisata yang terlalu berorientasi pada manfaat ekonomi mengurangi jumlah dan mutu sumberdaya hutan. Menurut Bank Dunia (2001) dan Alikodra (1998), laju penggundulan hutan di Indonesia periode 1985 sampai 1987 sebesar 16.5% atau 1 641 708 ha per tahun. Fenomena ini salah satu contoh tidak diperhitungkannya daya dukung alam. Kunjungan wisatawan yang terlalu besar dan tidak

terkendali ke sebuah kawasan jelas akan mempengaruhi lingkungan setempat. Habitat satwa akan terganggu oleh keriuhan suara pengunjung, atau oleh suara kendaraan, dan sampah-sampah cenderung dibuang di sembarang tempat. Tindakan yang tidak terpuji lainnya berupa penebangan hutan/kayu untuk bahan bangunan sarana pariwisata, penggunaan tanah dan air/sungai yang kurang memperhatikan kelestarian. Terdapat corat coret fasilitas penunjang pariwisata, atau tanda-tanda reklame yang mengurangi keindahan alami.

Untuk meminimalisir dampak negatif pariwisata massal, dewasa ini berkembang pariwisata alam atau lebih dikenal dengan ekoturisme (*ecotourism*). Pariwisata ini dianggap sebagai salah satu pendekatan wisata yang bertanggung jawab, wisata yang berorientasi konservasi, dan wisata yang berkelanjutan. Wisatawan memilih melakukan perjalanan ke kawasan alami untuk berpetualang, mengagumi dan menikmati keindahan alami. Menurut Kodhyat (1998), keuntungan ekoturisme antara lain, 1) memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, 2) tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat, dan 3) keberlanjutannya lebih terjamin. Ziffer & Young (1989) menambahkan bahwa keuntungan ekoturisme adalah: 1) meningkatkan perolehan dana konservasi, 2) meningkatkan pembangunan ekonomi, dan 3) menghindari pengrusakan sumberdaya alam.

Nilai ekonomi secara umum didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Konsep ini disebut sebagai keinginan membayar (*willingness to pay*) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan (Fauzi, 2010). Kerusakan sumber daya alam pada Obyek Wisata Ndayu Park maka akan sangat berpengaruh pada kemauan wisatawan untuk membayar (*willingness to pay*) pada Obyek Wisata Ndayu Park. Metode *willingness to pay* merupakan pengukuran menggunakan Metode Valuasi Kontingen (*Contingent Valuation Method/ CVM*).

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara selain dari sektor migas yang sangat potensial dan mempunyai andil besar dalam membangun perekonomian. Pemerintah sangat berharap bahwa sektor pariwisata akan mampu menjadi pengganti pemasok devisa utama setelah peran migas yang mengalami degradasi. Sebagai sektor strategis nasional, pariwisata juga mempunyai efek pengganda yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata baik bersifat langsung berupa penyerapan tenaga kerja disektor pariwisata maupun dampak tidak langsung berupa berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung pariwisata seperti penginapan, rumah makan, jasa transportasi dan lain-lain.

Industri pariwisata dalam tahun 1997 secara global menghasilkan US \$ 3.8 triliun Hasil Bruto (*Gross Output*) dan 262 juta pekerjaan diseluruh dunia.diperkirakan perolehan tersebut dalam tahun 2007 akan tumbuh menjadi US\$ 7.1 triliun Hasil Bruto dan 383 juta pekerjaan (Yoeti 1999). Lebih lanjut, Yoeti (1999) menyatakan bahwa untuk Indonesia pada tahun 1997 diperoleh Hasil Bruto sebesar Rp 64.480 milyar dan 6.6 juta pekerjaan dan untuk tahun 2007 diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 248.363 milyar Hasil Bruto serta 8.5 juta pekerjaan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pariwisata massal memberikan sumbangan yang signifikan dalam ekonomi.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PARIWISATA

Semakin merosotnya sumberdaya alam dalam era otonomi khususnya berkaitan dengan sifat atau ciri yang melekat pada lingkungan alami itu sendiri, sehingga manusia berusaha mengeksploitasinya. Ciri atau sifat yang melekat pada sumberdaya alami itu terdiri: sifat/cirinya sebagai barang publik, sifat/cirinya sebagai barang milik bersama (*common proverty*) serta adanya eksternalitas. Eksternalitas muncul apabila kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam menimbulkan dampak pada orang lain, baik dalam bentuk manfaat maupun biaya eksternal yang semuanya tidak memerlukan kewajiban untuk menerima atau melakukan pembayaran. Oleh karena eksternalitas tidak diperhitungkan, maka manfaat eksternal akan dapat menjadi terlalu kecil dan biaya eksternal akan menjadi terlalu besar, lebih-lebih bila berbentuk biaya yang ditanggung oleh masyarakat.

Prinsip-prinsip lama pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus segera ditinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan yang menghendaki perubahan-perubahan ke arah perbaikan untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang perlu dirombak adalah: bekerja pada kondisi keterbatasan data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan; pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dicirikan dengan praktek-praktek monopolistik dan sentralistik; mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang kepentingan ekologi; pendekatan pembangunan yang bertumpu pada batas-batas administratif dengan mengabaikan batasan/unit ekologi; pembangunan yang kurang terkoordinasi dan tidak terintegritas dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup; kurang diperhatikannya fungsi-fungsi ekologi yang mendukung

pembangunan, misalnya fungsi hutan mangrove, fungsi daerah resapan, fungsi terumbu karang, fungsi daerah rawa, fungsi lahan gambut, dsb.

Dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di kawasan pelestarian alam (seperti Taman nasional, Tahura) dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan untuk budaya dan wisata alam tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Sedangkan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan pariwisata-pariwisata alam di “kawasan konservasi” dalam kaitan dengan otonomi daerah mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa kewenangan bidang lain, termasuk konservasi tidak termasuk dalam kewenangan daerah. Daerah dalam undang-undang ini berwenang mengelola sumberdaya nasional yang terdapat di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara lingkungannya.

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten dan kota tidak termasuk konservasi. Kewenangan propinsi dalam pasal 2 meliputi kebijaksanaan pendayagunaan sumberdaya alam serta konservasi, yang khusus berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi alam, antara lain penyelenggaraan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan pengusahaan pariwisata alam lintas propinsi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah juga menjadi salah satu acuan dalam pengembangan pariwisata alam. Dalam pasal 6 ayat 5 disebutkan bahwa penerimaan negara dari sektor kehutanan (apabila kawasan konservasi dimasukkan dalam sektor kehutanan) dibagi dengan imbalan 80% untuk daerah dan 20% untuk pemerintah pusat.

Dalam Undang-undang Otonomi jangan sampai kekuatiran sebagian kalangan bahwa di era otonomi kerusakan sumberdaya hutan semakin menjadi-jadi, dan masalah kehutanan yang berada di pusat pindah ke daerah. Target peningkatan pendapatan asli oleh daerah jangan sampai menjadikan pengelolaan sumberdaya alam seperti hutan dan sumberdaya alam lainnya menjadi terkuras. Sumberdaya alam hutan dapat saja dimanfaatkan, namun harus serasi dengan penggalian manfaat sosial dan lingkungan. Sebab, setiap pemanfaatan sumberdaya hutan yang terlalu mengeksploitasi sisi keuntungan ekonomi saja akan menimbulkan dampak negatif yang secara akumulatif berakibat tingginya “cost” yang bakal diterima masyarakat. Pengalaman masa lampau yang telah menimbulkan berbagai kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan harus dihindari. Target dan upaya mencari dan memenuhi daya pembangunan daerah jangan mengorbankan kelestarian lingkungan.

Untuk mencegah kerusakan dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan, pemerintah daerah dalam hal ini harus memperhatikan berbagai faktor penentu yang berperan. Pertama, kemampuan sumberdaya manusia dan organisasi; kedua, perangkat aturan pelaksanaan termasuk norma dan batasan-batasannya; ketiga, kemampuan untuk melaksanakan segala peraturan (Alikodra 2000). Faktor-faktor penentu ini harus segera dipersiapkan untuk segera dapat menjalankan mandat otonomi secara profesional. Penyiapan faktor-faktor penentu memang membutuhkan konsentrasi dan biaya yang cukup mahal, namun jika diabaikan, maka sangat sulit bagi daerah untuk keluar dari akar permasalahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Diperlukan kebulatan tekad daerah bersama berbagai *stakeholders* untuk memobilisir seluruh kemampuan yang dimiliki dan menetapkan visi dan misi pembangunan daerah. Selanjutnya menjadi kewajiban kepala daerah menggerakkan seluruh *stakeholders* untuk mewujudkan visi dan misi daerahnya melalui kebijakan, strategi dan program- programnya baik jangka pendek

maupun jangka panjang. Peran DPRD sebagai wakil rakyat menjadi sangat penting dalam mencapai target pembangun daerah yang berwawasan lingkungan. Koordinasi dengan propinsi dan pemerintah pusat akan tetap diperlukan disamping untuk meningkatkan kemampuan institusi daerah dalam mengatasi permasalahan yang sifatnya lintas batas kabupaten/kota, juga untuk meningkatkan kemungkinan kerjasama dengan berbagai negara ataupun berbagai lembaga internasional.

Pengelolaan sumberdaya alam tidak terlepas para pengambil keputusan dibidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Merekalah yang berperan untuk merubah kondisi sumberdaya alam dan lingkungan, apakah menjadi semakin rusak atau menjadi semakin baik. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mengubah sikap dan perilaku mereka pada tingkat manapun agar tetap dalam koridor pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

Menurut Suparmoko dan Suparmoko (2000), penetapan nilai penggunaan barang publik yang tidak memiliki pasar (*non existence of the market*) dilakukan dengan beberapa pendekatan: a) pendekatan pendapatan; b) pendekatan kesejahteraan; c) penghitungan fisik dan d) penghitungan moneter. Dalam pendekatan pendapatan yang dipentingkan adalah perubahan yang terjadi pada sumberdaya alam, namun tidak perlu melihat berapa banyak persediaan sumber daya alam yang ada. Akan tetapi pendekatan ini tidak melihat hubungan antara kesejahteraan dengan volume sumberdaya alam yang diambil sehingga dikuatirkan sumberdaya alam diambil terus menerus.

Melalui pendekatan kesejahteraan ingin diketahui berapa sesungguhnya volume persediaan sumberdaya alam yang ada di suatu tempat. Semakin banyak persediaan sumberdaya alam, makin sejahtera wilayah bersangkutan, sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Pendekatan ini bagi pemerintah atau pengelola sumberdaya alam untuk menyesuaikan tingkat pengambilan sumberdaya alam sehingga terjadi

keseimbangan antara sumberdaya alam yang ada dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi penghitungan persediaan sumberdaya alam relatif sulit.

Perhitungan secara fisik dapat membantu dilakukannya perencanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Oleh karena sumberdaya alam merupakan faktor produksi bersama dengan faktor produksi lainnya dan masing-masing memiliki harga, akan menjadi lebih sempurna jika dilakukan nilai (*valuation*) terhadap sumberdaya sehingga dapat dijadikan prasyarat pembuatan neraca moneter sumberdaya alam.

Maksud penghitungan moneter adalah untuk disatukannya nilai penyusutan sumberdaya dan degradasi lingkungan ke dalam nilai Produk

BAB III

AKULTURASI BUDAYA DALAM PARIWISATA

Objek wisata alam yang unik dan khas akan menarik minat wisatawan untuk datang melakukan kunjungan wisata. Mereka dapat menikmati keindahan alam dan memperoleh pengalaman asli alami. Oleh karena wisatawan yang lazim disebut ekoturis melakukan perjalanan ke kawasan alam dengan penuh tanggungjawab terhadap lingkungan, maka pariwisata alam akan dapat menunjang upaya konservasi. Dalam implementasinya, pariwisata alam diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan konservasi dengan lingkungan yang dikembangkan dalam hubungan saling sinergi antara alam, penduduk dan wisatawan (Ross & Wall 1999). Wisatawan kategori ini tidak saja terbatas melakukan kegiatan pengamatan, melainkan ada yang melakukan penelitian. Artinya, pariwisata alam akan dapat mengembangkan penelitian, pendidikan dan latihan di objek pariwisata setempat. Dana yang diperoleh dari kegiatan pariwisata alam dapat dikembalikan untuk tujuan pengelolaan konservasi lingkungan fisik. Menurut Bjork (2000) peningkatan pengetahuan akan lingkungan yang disebabkan adanya hal yang unik dan khas di alam akan dapat menciptakan kesadaran hubungan timbal antara lingkungan yang bagus dengan ekonomi yang bagus.

Kegiatan pariwisata alam akan dapat menimbulkan proses akulturasi budaya terhadap kebudayaan itu sendiri serta interaksi yang terjadi antara kebudayaan-kebudayaan. Kebudayaan setempat akan semakin tumbuh dan berkembang karena semakin banyaknya wisatawan yang datang untuk mengetahui dan melihat kebudayaan asli tersebut. Bahkan akan dapat terjadi penggalan nilai-nilai budaya asli oleh masyarakat itu sendiri.

Pariwisata alam dapat menimbulkan gairah untuk meningkatkan serta mendorong kehidupan sosial dan budaya

masyarakat, meningkatkan partisipasi serta menimbulkan sikap keterbukaan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur. Oleh Goodwin dan Roe (2001), dikemukakan bahwa pariwisata alam di sebuah taman nasional harus dapat merespon aspirasi dan memenuhi harapan untuk menjamin kehidupan masyarakat lokal sekitarnya berupa kesempatan kerja dan berusaha. Dan pada sisi lain, pariwisata alam akan dapat mendorong tetap terpeliharanya monumen-monumen kebudayaan, tempat bersejarah, seni tradisional, upacara dan pakaian adat.

Dari sisi sosial, pariwisata alam ikut berperan secara nyata menyadarkan masyarakat akan perlunya saling pertemuan yang dapat menimbulkan saling pengertian dalam segala aspek kehidupan yang pada akhirnya dapat memperluas ruang lingkup hubungannya dengan manusia lain. Pariwisata alam dapat meningkatkan kemajuan cara berpikir masyarakat.

Secara politik, pariwisata alam yang berlangsung dengan baik akan dapat meningkatkan hubungan perdamaian antar bangsa. Kunjungan wisata akan dapat membangun saling pengertian pada perbaikan tatanan hubungan antar bangsa, oleh karena adanya saling pengertian dan penghargaan antar personal yang menjelma menjadi hubungan antar bangsa.

Secara ekonomi pariwisata alam akan mendatangkan peningkatan pendapatan devisa negara dan pendapatan daerah, serta menciptakan kesempatan kerja/ berusaha bagi masyarakat sekitar lokasi pariwisata alam. Kegiatan pariwisata alam secara umum akan dapat mempengaruhi permintaan, penawaran, neraca pembayaran, ketenagakerjaan, pengeluaran, pembangunan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pariwisata alam akan dapat membantu dan menunjang gerak pembangunan, baik oleh karena penyediaan prasarana maupun penyediaan sarana pariwisata. Menurut Joppe (1996), perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah masyarakat setempat memang menerima suatu manfaat atau tidak karena adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

BAB IV

PENINGKATAN EKONOMI LINGKUNGAN & EKONOMI MASYARAKAT

A. Peningkatan Ekonomi Lingkungan

Perekonomian di sini mengacu pada keadaan yang menunjukkan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam melakukan pilihan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu tentang memilih diantara berbagai alternatif. Pembahasan ilmu ekonomi (*economics*) selalu berkaitan terutama dengan efisiensi dan alokasi sumber-sumber produktif yang langka (*scarcity*), dan dengan pertumbuhan yang optimal dari sumber-sumber itu untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang lebih besar. Sedangkan ekonomi pembangunan mempunyai ruang lingkup (*scope*) yang lebih luas dan kompleks (Suryana 2000). Ekonomi pembangunan juga berkaitan dengan formulasi kebijaksanaan pemerintah baik ekonomi maupun non ekonomi yang diantaranya dengan melibatkan variabel-variabel ekonomi makro secara langsung seperti *income*, investasi, kesempatan kerja (*employment*), dan gabungan faktor-faktor non ekonomi yang sama-sama relevan seperti alokasi sumberdaya yang efisien, perbaikan institusional, usaha-usaha perbaikan diri, nilai-nilai, sikap ekonomi dan politik pemerintah maupun swasta untuk mempercepat dan memperbesar skala tingkat hidup.

Dengan demikian, ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah yang dihadapi negara-negara sedang berkembang dan cara-cara untuk mengatasi masalah itu. Pembangunan ekonomi bukan saja terbatas pada suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat dalam jangka

panjang, melainkan suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar secara sosial dalam ekonomi. Pembahasan ilmu ekonomi pembangunan bersifat deskriptif dan analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian masyarakat di negara-negara sedang berkembang dan implikasinya serta kemungkinan untuk membangun ekonomi sebuah kawasan/negara. Pembahasan yang bersifat pilihan kebijaksanaan dapat dilakukan dalam usaha-usaha untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara tersebut.

Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi/peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk jangka panjang (Suparmoko dan Suparmoko 2000). Lingkungan menurut Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23/1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan demi peningkatan kesejahteraan manusia, peranan lingkungan telah mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Bahan mentah yang disediakan lingkungan alami telah semakin berkurang dan menjadi langka. Kemampuan alam untuk mengolah limbah semakin berkurang karena terlalu banyaknya limbhah yang harus ditampung dan melebihi daya dukungnya. Kemampuan alam menyediakan kesenangan dan kegembiraan juga semakin berkurang karena banyaknya sumberdaya alam dan lingkungan yang telah dirubah fungsinya atau oleh karena meningkatnya pencemaran

B. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat yang dimaksudkan sama dengan perekonomian rakyat. Ekonomi kerakyatan menurut Abimanyu (1999) lebih merupakan kata sifat, yakni memberdayakan (kelompok atau satuan unit) ekonomi yang tertinggal yang berskala kecil dan menengah. Ekonomi rakyat dapat dikonotasikan dengan satuan (usaha atau unit) ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah.

Ekonomi kerakyatan mencakup lingkungan dan kelembagaan (bahkan sistem) yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kegiatan kelompok ekonomi yang tertinggal. Ekonomi kerakyatan berkeinginan untuk membangun kelembagaan atau sistem yang memberdayakan ekonomi rakyat. Kebijakan nyata bisa saja tidak dalam bentuk kredit murah atau subsidi kepada petani dan usaha kecil menengah. Keberpihakan kebijakan dapat berbentuk penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, penyehatan rekapitulasi perbankan, atau undang-undang anti monopoli. Komitmen pemerintah untuk memperbaiki perbankan dan memprioritaskan pembenahan pada institusi bank dan finansial yang langsung berkaitan dengan rakyat kecil, merupakan salah satu upaya nyata menjalankan prinsip ekonomi kerakyatan.

Para pelaku ekonomi rakyat lemah posisinya dibandingkan dengan para pelaku ekonomi lainnya, sehingga keberadaan mereka dalam peta perekonomian menjadi marjinal. Persoalannya terkait dengan penguasaan teknologi, kepemilikan modal, akses ke pasar dan sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen. Secara faktual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Status usaha bersifat pribadi atau kekeluargaan; tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat; administrasi sangat sederhana; dan struktur modalnya sangat bergantung pada modal tetap.